

ABSTRAK

Romida Asti, Silviawati. NIM 1168010258. 2023. *Implementasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Rata-rata nilai pencapaian penyusutan arsip dalam Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2019 sangat kurang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menganggulangi tingkat penyusutan arsip dalam setiap tahunnya. Salah satunya dengan diadakan kegiatan pedoman penyusutan arsip seperti pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip. Upaya tersebut berfungsi sebagai langkah untuk memperbaiki mutu Organisasi Perangkat Daerah terhadap tertibnya melakukan penyusutan arsip dalam setiap tahun agar mengurangi volume arsip yang tertimbun.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan dimensi dari George C. Edward III

Penelitian ini mengacu pada Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan melalui enam dimensi kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Setelah dilakukan penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih adanya beberapa hal yang belum sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyusutan Arsip yaitu: 1) keterbatasan

sumber daya manusia. 2) sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3) masih kurangnya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah terhadap kegiatan penyusutan arsip tersebut. Dengan demikian haruslah ada upaya pembenahan dalam pengadaan sumber daya manusia yang ahli, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mempertimbangkan kembali kebijakan kursus kepada organisasi perangkat daerah yang tidak melakukan kegiatan penyusutan arsip.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyusutan Arsip

